

Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dalam Upaya Mitigasi Bencana di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2024

Aditya Noor Azmi¹, Suwaib Amiruddin², Ima Maisaroh³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹²³

Korespondensi Email : 6661210033@untirta.ac.id

Abstract

The Disaster Resilient Village/Sub-district Program (DESTANA) is a disaster mitigation effort developed by the National Disaster Management Agency through a community-based Disaster Risk Reduction policy. This study aims to determine how the Disaster Resilient Village Program is implemented in disaster mitigation in Cigondang Village, Labuan District, Pandeglang Regency in 2023–2024. The approach used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. George C. Edward III's policy implementation theory is used as an analytical framework, which includes four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the Destana Program in Cigondang Village has not been optimal. In the communication dimension, the delivery of program information has not been evenly distributed to the community. In the resource dimension, limited facilities and infrastructure, and information support can hinder the implementation of mitigation activities. In the disposition dimension, the activeness of implementers is still reactive and mitigation activities have not been carried out consistently. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, there are no clear Standard Operating Procedures at the district or village levels. This finding underscores the need to strengthen cross-level policies to ensure more effective, targeted, and sustainable program implementation.

Keywords: Policy Implementation, Disaster Resilient Village, Disaster Mitigation, Cigondang Village.

Abstrak

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan salah satu upaya mitigasi bencana yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui kebijakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Desa Tangguh Bencana dalam mitigasi bencana di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023–2024. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, yang meliputi empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Destana di Desa Cigondang belum berjalan optimal. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi program belum merata kepada masyarakat. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana, serta dukungan informasi yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan mitigasi. Pada dimensi disposisi, keaktifan pelaksana masih bersifat reaktif dan kegiatan mitigasi belum dilakukan secara konsisten. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi belum terdapat Standar Operasional Prosedur yang jelas di tingkat kabupaten maupun desa. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan lintas tingkat agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Desa Tangguh Bencana, Mitigasi Bencana, Desa Cigondang.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi terkait dengan bencana alam. Hampir setiap tahun, berbagai peristiwa bencana terjadi dan berdampak pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tingginya potensi bencana di Indonesia terkait erat dengan kondisi geografisnya, yang berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik, sehingga aktivitas geologinya tergolong cukup tinggi. Selain itu, letak Indonesia yang berada di jalur Cincin Api Pasifik semakin meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis bencana alam, baik yang berskala kecil maupun besar (Rusfiana & Lestari, 2021).

Kondisi tingginya kejadian bencana alam di Indonesia tercermin dari data yang dirilis oleh PDSI Pusdatinkom BNPB (2025). Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 3.472 kejadian bencana alam yang terjadi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari keseluruhan kejadian tersebut, banjir menjadi jenis bencana yang paling dominan dengan total 1.420 kejadian. Selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 973 kejadian, diikuti oleh cuaca ekstrem sebanyak 733 kejadian, serta tanah longsor sebanyak 207 kejadian. Selain itu, bencana kekeringan dilaporkan sebanyak 89 kejadian, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 27 kejadian, gempa bumi sebanyak 15 kejadian, dan erupsi gunung api sebanyak 8 kejadian.

Salah satu wilayah rawan bencana adalah Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan kondisi geologi Banten sangat rentan terhadap berbagai bencana karena lokasinya yang berada di zona aktif tektonik. Selain itu, kondisi iklim di Provinsi Banten memicu potensi bencana hidrometeorologi. Kombinasi faktor geologi dan iklim ini menjadikan Banten rawan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan (BNPB, 2021). Data dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), di tahun 2024 Provinsi Banten dikategorikan dalam kelas risiko sedang dengan skor 128,64. Dengan Kabupaten Pandeglang yang menduduki nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tertinggi di angka 192.52. Kondisi ini menandakan bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, dengan kejadian bencana hampir terjadi setiap tahun, termasuk banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Tabel 1 Data Jumlah Kejadian Bencana per-Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2022-2024

Kecamatan Teratas	2022 (Jumlah Kejadian Bencana)	2023 (Jumlah Kejadian Bencana)	2024 (Jumlah Kejadian Bencana)
1	Pagelaran (110)	Kaduhejo (18)	Patia (19)
2	Labuan (71)	Majasari (18)	Jiput (13)
3	Carita (28)	Pandeglang (17)	Majasari (12)
4	Patia (23)	Cimanuk (10)	Labuan (10)
5	Panimbang (21)	Labuan (7)	Kaduhejo (10)

Sumber: BPBD Provinsi Banten (diolah penulis, 2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, Kecamatan Labuan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pandeglang yang memiliki potensi kejadian bencana relatif tinggi. Kecamatan ini secara konsisten tercatat sebagai salah satu wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa Kecamatan Labuan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai kejadian bencana,

Pemerintah memiliki peran krusial dalam upaya penanggulangan bencana, mengingat tingginya potensi serta frekuensi kejadian bencana di wilayah Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari kebijakan mitigasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) untuk meminimalkan dampak bencana (Buchari, 2020). Dalam pelaksanaannya, pengembangan program PRB tersebut dituangkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, yang mendefinisikan Desa Tangguh Bencana sebagai sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumberdaya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana (Perka BNPB, 2012). Program ini mengharuskan semua elemen desa, termasuk pemerintahan desa, masyarakat, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), untuk mampu melaksanakan manajemen bencana guna memperkecil risiko yang ditimbulkan oleh potensi bencana (Wibisono et al., 2023). Salah satu lokasi pelaksanaan program ini adalah Desa Cigondang, yang berada di Kecamatan Labuan.

Desa Cigondang termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi, khususnya terhadap banjir dan potensi tsunami, mengingat lokasinya yang dekat dengan Selat Sunda. Untuk memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman tersebut, pemerintah menetapkan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai strategi mitigasi berbasis komunitas melalui pelatihan, edukasi, dan pembentukan kelembagaan lokal. Program Destana ini mulai diimplementasikan di Desa Cigondang sejak tahun 2023, yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan resmi sebagai dasar pelaksanaannya.

Di Desa Cigondang, implementasi program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana secara mandiri dan tanggap. Namun, hasil observasi awal menunjukan bahwa pelaksanaannya belum berjalan baik, Masyarakat masih memiliki pola pikir reaktif, di mana kegiatan mitigasi jarang dilakukan pada kondisi normal dan lebih aktif ketika bencana sudah terjadi. Selain itu, desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara khusus pelaksanaan program Destana sehingga belum terdapat landasan hukum yang jelas untuk pengorganisasian, penganggaran, dan keberlanjutan program mitigasi. Permasalahan lainnya adalah minimnya sarana dan prasarana kebencanaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada keberadaan kebijakan, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan untuk menganalisis pelaksanaan Program DESTANA di Desa Cigondang. Menurut George C. Edwards III dalam Sawir (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan yang berada di antara pembentukan kebijakan, seperti tindakan legislatif, penerbitan perintah eksekutif, penyerahan keputusan peradilan, atau dikeluarkannya suatu peraturan, serta konsekuensi kebijakan yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang terdampak olehnya.

Lebih lanjut, George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Sawir, 2021). Keempat dimensi tersebut dinilai relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program DESTANA, mulai dari proses penyampaian informasi kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, sikap dan komitmen para pelaksana, hingga tata kelola dan pembagian peran dalam struktur birokrasi di tingkat desa.

Dengan demikian, penerapan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sejauh mana Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Cigondang telah diterapkan sesuai dengan tujuan kebijakan yang dirancang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena tersebut meliputi perilaku, pandangan, motivasi, serta tindakan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat dan dikaji secara menyeluruh. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi dan realitas yang terjadi di lapangan secara alami. Data penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif menggunakan bahasa dan kata-kata yang sesuai dengan konteks alamiah. Penelitian ini berlokasi di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian penelitian. Pemilihan informan ditentukan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan menentukan informan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, di mana informan tersebut dinilai memiliki pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap topik yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020).

Menurut (Hardani et al., 2020), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam Abdussamad (2021). Model analisis tersebut meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain itu, uji keabsahan data juga diperkuat melalui proses *member check* (Hardani et al., 2020).

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis data di lapangan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Cigondang dipahami melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam menentukan kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan kegiatan mitigasi bencana. Oleh karena itu, pembahasan tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan

masing-masing dimensi, tetapi juga menjelaskan bagaimana keterbatasan koordinasi, kapasitas pelaksana, komitmen kelembagaan, dan prosedur operasional dapat membentuk kesenjangan antara pembentukan program dan pelaksanaan mitigasi secara berkelanjutan.

Penelitian Ravazzoli et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana perlu dinilai berdasarkan siapa yang berpartisipasi, bagaimana keterlibatan berlangsung, serta sejauh mana partisipasi memengaruhi keputusan. Perspektif tersebut memperluas penggunaan model Edwards III karena keberhasilan implementasi tidak cukup ditentukan oleh keberadaan organisasi pelaksana, tetapi juga kemampuan organisasi menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi DESTANA di Desa Cigondang dianalisis sebagai proses kelembagaan yang membutuhkan koordinasi, pembelajaran, dan keterlibatan masyarakat secara berkesinambungan.

Komunikasi

Dalam pelaksanaan program ini, komunikasi dilakukan melalui jalur formal seperti sosialisasi, pelatihan, dan simulasi yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa. Selain itu, komunikasi informal melalui grup WhatsApp juga menjadi sarana penting untuk koordinasi, penyampaian informasi, serta pengaturan kegiatan secara cepat dan fleksibel.

Proses komunikasi dalam implementasi Program DESTANA mampu menjangkau para pelaksana kebijakan dengan baik. Fasilitator daerah berperan sebagai penghubung antara regulator nasional dengan pemerintah desa, memastikan materi, jadwal, dan tata cara pelaksanaan diteruskan kepada fasilitator desa dan forum DESTANA. Forum kemudian menyebarkan informasi melalui sosialisasi kebencanaan, poster mitigasi, dan kegiatan edukatif di sekolah. Pola komunikasi berlapis ini memperlihatkan adanya mekanisme koordinasi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menuju pelaksana lokal.

Meskipun demikian, penyampaian informasi kepada masyarakat luas belum sepenuhnya optimal. Sejumlah warga mengetahui adanya kegiatan pelatihan atau sosialisasi, tetapi belum memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program DESTANA. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penyampaian informasi kepada pelaksana belum secara otomatis menghasilkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan tanggung jawab dalam mitigasi bencana.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Mukarromah dan Pranoto (2024), yang mengidentifikasi ketidakmerataan penyebaran informasi kebencanaan sebagai salah satu tantangan implementasi desa tangguh bencana di Jawa Tengah. Penelitian Sarini et al. (2025) di Kabupaten Lamandau juga menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan masyarakat dan koordinasi antarpemangku kepentingan dapat menghambat kesiapsiagaan. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya saluran informasi, tetapi juga dengan kesinambungan penyampaian pesan dan kemampuan masyarakat memahami serta menggunakan informasi tersebut.

Dalam konteks Desa Cigondang, penggunaan WhatsApp dapat dipahami sebagai sarana koordinasi yang membantu mempercepat pertukaran informasi antarpelaksana. Akan tetapi, komunikasi digital memiliki keterbatasan apabila hanya menjangkau anggota forum atau individu yang aktif menggunakan teknologi. Penelitian McDermott et al. (2025) mengenai platform partisipasi digital dalam tata kelola risiko di Surabaya

memberikan perspektif bahwa teknologi dapat mendukung keterlibatan masyarakat, tetapi efektivitasnya perlu dikaitkan dengan proses partisipasi dan penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, strategi komunikasi DESTANA perlu dibedakan menjadi komunikasi internal dan komunikasi publik. Komunikasi internal diarahkan pada kejelasan pembagian tugas, jadwal, dan prosedur pelaksanaan, sedangkan komunikasi publik ditujukan untuk memastikan masyarakat memahami ancaman bencana, tindakan penyelamatan, jalur evakuasi, dan sumber informasi resmi. Perbedaan ini penting agar keberhasilan koordinasi antarpelaksana tidak digunakan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari perspektif implementasi kebijakan, penguatan komunikasi juga memerlukan mekanisme umpan balik. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi melalui poster atau sosialisasi, tetapi perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan, dan memberikan masukan terhadap kegiatan mitigasi. Dengan demikian, komunikasi menjadi proses dua arah yang menghubungkan kebijakan formal dengan pengetahuan serta pengalaman masyarakat pesisir.

Sumber Daya

Temuan lapangan menunjukkan bahwa jumlah dan kapasitas pelaksana program di desa belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan wilayah, terutama mengingat kondisi geografis yang rawan bencana. Walaupun anggota forum telah mengikuti pelatihan, tingkat pemahaman dan kemampuan teknis masih berbeda-beda sehingga tidak seluruh pelaksana mempunyai kapasitas yang sama dalam menjalankan tugas. Dukungan sosial berupa partisipasi warga ketika terjadi bencana menjadi kekuatan tambahan, tetapi belum sepenuhnya dapat menggantikan kebutuhan sumber daya program yang terencana.

Dari aspek informasi, pelaksanaan Program DESTANA didukung pedoman resmi BNPB. Namun, pemerataan akses dokumen belum optimal karena sejumlah dokumen penting hanya tersedia pada tingkat fasilitator daerah, sedangkan pelaksana desa tidak mempunyai salinan yang lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kesinambungan kegiatan ketika terjadi pergantian personel atau berkurangnya pendampingan.

Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Barus et al. (2025) mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana terdesentralisasi pada desa DESTANA di sekitar Gunung Sinabung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan organisasi lokal dapat mempertemukan aktor-aktor yang memiliki pengetahuan kebencanaan, tetapi keterbatasan regulasi dan alokasi sumber daya masih dapat menghambat keberlangsungan kegiatan mitigasi. Perbandingan ini penting karena memperlihatkan bahwa pembentukan forum belum dengan sendirinya menjamin kemampuan operasional organisasi.

Dalam konteks Cigondang, sumber daya perlu dipahami melalui empat komponen yang saling melengkapi, yaitu kompetensi manusia, ketersediaan informasi, kewenangan pelaksana, serta sarana dan prasarana. Keberadaan anggota forum tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah personel, melainkan juga kemampuan memahami informasi risiko, mengoordinasikan evakuasi, mengoperasikan peralatan, dan menyampaikan pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat.

Penelitian Tamrin et al. (2025) mengenai model partisipasi mitigasi berbasis masyarakat di Kabupaten Majene memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Pujiono dan Fandayati (2023) membahas pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan praktik langsung dalam program desa tangguh bencana. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar bahwa peningkatan kapasitas tidak cukup berupa penyampaian materi, tetapi perlu diarahkan pada keterampilan yang dapat dipraktikkan.

Keterbatasan fasilitas teknis di Desa Cigondang juga perlu dikaitkan dengan karakter ancaman bencana setempat. Sebagai wilayah pesisir yang menghadapi potensi banjir dan tsunami, kebutuhan peralatan harus dirumuskan berdasarkan jenis ancaman, kondisi permukiman, akses evakuasi, dan kapasitas masyarakat. Pengadaan fasilitas tanpa identifikasi kebutuhan berisiko menghasilkan perlengkapan yang kurang sesuai dengan situasi operasional.

Selain itu, pengelolaan dokumen dan informasi perlu memperoleh perhatian yang setara dengan penyediaan peralatan fisik. Pedoman operasional, peta ancaman, jalur evakuasi, pembagian tugas, serta catatan pelatihan perlu disimpan secara tertib dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Sistem dokumentasi sederhana yang konsisten dapat membantu mengurangi ketergantungan pada individu tertentu dan mendukung transfer pengetahuan antarpelaksana.

Dengan demikian, penguatan sumber daya DESTANA sebaiknya diarahkan pada pemetaan kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas yang tersedia. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai dasar prioritas pelatihan, perencanaan pengadaan peralatan, serta koordinasi bantuan teknis dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelaksana cenderung bervariasi. Antusiasme relatif tinggi pada tahap awal kegiatan, tetapi mulai berkurang ketika intensitas pendampingan menurun. Akibatnya, kegiatan pencegahan dan mitigasi belum berlangsung secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana masih dipengaruhi keberadaan dukungan eksternal dan belum sepenuhnya berkembang menjadi rutinitas kelembagaan yang berkelanjutan.

Dari sisi pengaturan pelaksana, struktur organisasi telah disusun dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun, sebagian anggota forum dan warga belum memahami secara mendalam proses pembentukan organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya keterbukaan informasi mengenai keanggotaan, tanggung jawab, dan kesempatan partisipasi.

Penelitian Pradana et al. (2025) mengenai pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di kawasan pesisir Kupang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dipengaruhi oleh konfigurasi sosial, budaya, dan kelembagaan. Temuan tersebut mengingatkan bahwa keterwakilan formal belum selalu mencerminkan keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterwakilan dalam forum DESTANA Cigondang perlu dipahami bukan sekadar keberadaan unsur masyarakat dalam struktur organisasi, melainkan kesempatan nyata untuk berpartisipasi sesuai kemampuan dan kebutuhan.

Keterlibatan pelaksana yang bersifat sukarela juga menjadi karakter penting program. Partisipasi sukarela mencerminkan kepedulian sosial masyarakat, tetapi tidak selalu menjamin ketersediaan waktu dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan mitigasi

secara teratur. Penelitian Milašinović (2025) menekankan bahwa keberlanjutan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat memerlukan dukungan kelembagaan, pengembangan kapasitas, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dari perspektif disposisi Edwards III, komitmen pelaksana bukan hanya berkaitan dengan kemauan individu, melainkan juga dengan kondisi organisasi yang memungkinkan kemauan tersebut diwujudkan. Apabila kegiatan hanya berlangsung ketika terdapat fasilitator atau bantuan eksternal, maka keberlanjutan program berpotensi bergantung pada keberadaan dukungan tersebut. Penurunan aktivitas setelah pendampingan berkurang perlu dipahami sebagai persoalan hubungan antara komitmen, sumber daya, dan pelembagaan program.

Penelitian Susilastuti et al. (2025) menempatkan DESTANA sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesiapsiagaan. Perspektif pemberdayaan tersebut relevan untuk mengembangkan disposisi pelaksana melalui kesempatan mengambil keputusan, pembagian tanggung jawab yang jelas, pengakuan kontribusi sukarelawan, serta keberlanjutan pelatihan.

Penguatan komitmen tidak harus semata-mata dilakukan melalui insentif finansial. Kegiatan evaluasi bersama, pembelajaran dari simulasi, pemberian tanggung jawab yang sesuai, dan pengakuan terhadap kontribusi anggota dapat dipertimbangkan sebagai bentuk dukungan nonfinansial. Namun, efektivitas berbagai pendekatan tersebut masih perlu diuji dalam konteks Desa Cigondang karena penelitian ini belum melakukan evaluasi intervensi terhadap motivasi pelaksana.

Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program DESTANA masih bergantung pada pedoman pusat, terutama Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Pada tingkat desa, forum telah mempunyai Surat Keputusan sebagai dasar pembentukan, tetapi berdasarkan uraian penelitian belum tersedia Peraturan Desa atau SOP lokal yang secara khusus mengatur kegiatan mitigasi, penanganan bencana, dan koordinasi dengan pihak luar.

Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya membedakan antara legalitas pembentukan organisasi dan pengaturan prosedur operasional. Surat Keputusan dapat menjadi dasar penetapan forum, sedangkan prosedur teknis diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai tindakan, penanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan. Ketiadaan SOP khusus tidak otomatis berarti tidak ada prosedur yang berlaku, karena pedoman nasional dan ketentuan sektoral masih dapat menjadi rujukan. Oleh karena itu, kebutuhan penyusunan SOP lokal harus didasarkan pada evaluasi dokumen dan pembagian kewenangan yang sebenarnya.

Penelitian Iva et al. (2025) mengenai diseminasi pedoman DESTANA di Nusa Tenggara Barat menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan daerah dan pemahaman pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program. Sementara itu, Mendrofa et al. (2026) menyoroti integrasi DESTANA ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa sebagai prasyarat penting keberlanjutan kelembagaan.

Dalam konteks Desa Cigondang, penguatan struktur birokrasi dapat diarahkan pada penjelasan hubungan antara pemerintah desa, forum DESTANA, fasilitator, BPBD, dan unsur masyarakat. Pembagian peran tidak perlu menghilangkan semangat gotong royong, tetapi harus memastikan bahwa terdapat pihak yang bertanggung jawab

terhadap koordinasi, dokumentasi, pemutakhiran informasi, pengelolaan peralatan, dan pelaksanaan simulasi.

Penelitian Tumembow et al. (2025) mengenai perencanaan partisipatif dalam kesiapsiagaan banjir dan tanah longsor menunjukkan relevansi pelibatan masyarakat dalam penyusunan strategi penanggulangan bencana. Hal ini memberikan dasar bagi pemerintah desa untuk mempertimbangkan penyusunan rencana kerja DESTANA melalui musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Penguatan struktur kelembagaan juga memerlukan mekanisme evaluasi berkala. Evaluasi dapat diarahkan pada keterlaksanaan kegiatan, pembaruan dokumen, kehadiran pelaksana, partisipasi masyarakat, serta tindak lanjut hasil simulasi. Indikator tersebut merupakan usulan pengukuran untuk pengembangan program, bukan capaian yang telah dibuktikan dalam penelitian Desa Cigondang.

Secara keseluruhan, empat dimensi implementasi Edwards III memperlihatkan hubungan yang saling memengaruhi. Komunikasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat dapat membatasi pemahaman dan partisipasi. Keterbatasan sumber daya dapat mengurangi kemampuan forum melaksanakan kegiatan secara rutin. Disposisi yang bergantung pada pendampingan dapat memengaruhi kesinambungan aktivitas, sedangkan prosedur kelembagaan yang belum terperinci dapat menyulitkan pembagian tanggung jawab dan tindak lanjut kegiatan.

Sintesis ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi DESTANA di Desa Cigondang tidak cukup dipahami sebagai persoalan individual pelaksana ataupun kekurangan fasilitas secara terpisah. Permasalahan tersebut perlu dibaca sebagai kesenjangan antara pembentukan kelembagaan, penyediaan kapasitas, dan pelebagaan praktik mitigasi sehari-hari. Dengan demikian, kontribusi analitis penelitian terletak pada penjelasan mengenai keterkaitan empat dimensi implementasi dalam memahami keberlanjutan mitigasi pada komunitas pesisir.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan mencakup penguatan komunikasi dua arah, pemetaan kebutuhan sumber daya, dukungan terhadap relawan, serta penyusunan prosedur dan rencana kerja yang sesuai dengan kewenangan pemerintah desa. Seluruh rekomendasi tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan penilaian kebutuhan dan dievaluasi secara bertahap.

Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif pada satu desa, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan sebagai gambaran seluruh penyelenggaraan DESTANA di Indonesia. Namun, temuan dan sintesis literatur memberikan dasar untuk penelitian lanjutan yang dapat menilai keberlanjutan aktivitas forum, kualitas partisipasi masyarakat, serta perubahan kapasitas kesiapsiagaan melalui pengamatan yang lebih panjang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Dalam Upaya Mitigasi Bencana di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2024 telah berjalan dengan baik, namun belum berada pada tingkat optimal. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III menunjukkan bahwa keempat dimensi komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi program di tingkat desa.

Pada dimensi komunikasi, alur informasi dari tingkat pusat hingga pelaksana di desa telah berjalan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, serta komunikasi digital. Namun, distribusi informasi kepada masyarakat umum belum merata sehingga pemahaman masyarakat mengenai program masih rendah.

Pada dimensi sumber daya, pelaksanaan program terbatas oleh jumlah pelaksana, variasi kompetensi anggota forum, pemerataan informasi yang kurang optimal, serta minimnya fasilitas pendukung. Ketersediaan peralatan teknis yang masih sangat terbatas menyebabkan kegiatan mitigasi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Dari sisi disposisi, sikap dan komitmen pelaksana program menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Motivasi yang tinggi pada awal program tidak terjaga secara konsisten setelah intensitas pendampingan menurun. Ketidadaan insentif dan keterlibatan bersifat sukarela membuat aktivitas forum tidak berlangsung secara rutin.

Pada dimensi struktur birokrasi, pelaksanaan program masih bergantung pada pedoman pusat karena belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Peraturan Desa sebagai landasan hukum lokal. Keberadaan SK forum memang memberikan legalitas dasar, tetapi tidak cukup untuk mengatur mekanisme pelaksanaan mitigasi secara komprehensif.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif (P. Rapanna, Ed.; Cetakan 1). Syakir Media Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Kajian risiko bencana nasional Provinsi Banten 2022–2026.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). IRBI: Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2024 (R. Yunus, Ed.; Vol. 3). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Barus, R. K. I., Lubis, S., Kurniawati, D., Pohan, S., & Dwiana, R. (2025). Implementation of decentralized disaster management: A case study of Destana village near Sinabung volcano. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10 (42s). <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i42s.7909>
- Buchari, A. (2020). Manajemen mitigasi bencana dengan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana Kabupaten Garut Indonesia. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 1 (1), 1–10.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif (Husnu Abadi, Ed.; Cetakan I). CV Pustaka Ilmu.
- Iva, N. I., Hifny, N. L. W., Efendi, J., & Noor, A. (2025). Diseminasi pedoman Desa Tangguh Bencana di Nusa Tenggara Barat. *Abdi Nusa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (3), 281–287. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v5i3.601>
- McDermott, R., Sagala, S., Susetyo, N. A., Insan, A., Harahap, W. D. P., Indrarini, A., & Azhari, D. (2025). The role of digital participation platforms in risk-informed development: A case study of Surabaya, Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 26, 100430. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100430>

- Mendrofa, K., et al. (2026). Analisis implementasi program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dalam meningkatkan ketahanan masyarakat desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 10 (3), 1798–1808. <https://doi.org/10.31604/jim.v10i3.2026.1798-1808>
- Milašinović, S. (2025). Community-based disaster risk reduction: Overcoming barriers to build stronger communities. *International Journal of Disaster Risk Management*, 7 (2). <https://doi.org/10.18485/ijdrm.2025.7.2.7>
- Mukarromah, L., & Pranoto, Z. L. (2024). Evaluasi implementasi Desa Tangguh Bencana: Studi kasus di Jawa Tengah dan peran teknologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (11), 370–382. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12698797>
- PDSI Pusdatinkom BNPB. (2025). Data bencana Indonesia 2024 (A. Muhari, T. Harjito, F. Irawan, & A. C. Utomo, Eds.; Vol. 3). Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Pradana, I. P. Y. B., Rohi, R., & Patricia, A. C. (2025). When resilience excludes: Gendered power, intersectionality, and community-based disaster risk reduction in coastal Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 29 (2). <https://doi.org/10.22146/jkap.107637>
- Pujiono, F. A. K., & Fandayati, I. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) di Kelurahan Tamanan dan Lirboyo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 2 (2). <https://doi.org/10.20961/ijed.v2i2.768>
- Ravazzoli, E., Lavarello-Schettini, R., Oberti, B., & Maino, F. (2025). Community-based approaches in disaster risk reduction and climate change adaptation: An analysis of applied participatory processes. *Climatic Change*, 178, Article 225. <https://doi.org/10.1007/s10584-025-04078-0>
- Rusfiana, Y., & Lestari, M. N. (2021). Strategi antisipasi potensi bencana alam di Kabupaten Bandung. *Jurnal Konstituen*, 3 (1), 31–39.
- Sarini, O., Aquarini, A., & Fatchurahman, M. (2025). Evaluasi implementasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Lamandau. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 5 (1), 11–20. <https://doi.org/10.37090/jpap.v5i1.2069>
- Sawir, M. (2021). Ilmu administrasi dan analisis kebijakan: Konseptual dan praktik publik. CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Susilastuti, S., Maarif, S., Kusuma, K., & Kurniadi, A. (2025). Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesiapsiagaan bencana. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4 (2), 1405–1413. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7302>
- Tamrin, S. H., Syahrinullah, S., Pauzi, R., Asratillah, M., & Rukmana, N. S. (2025). Community-based natural disaster mitigation participation model in Majene Regency. *PINISI Discretion Review*, 8 (2). <https://doi.org/10.26858/pdr.v8i2.69476>
- Tumembow, H. M. S., Ferriswara, D., Haryati, E., & Kamariyah, S. (2025). The role of participatory planning in community-based flood and landslide disaster preparedness (Manado City). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2 (3). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.1094>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007).

Wibisono, Wicaksono, W., Dinata, R. F. P., Harahap, R. N., Nazrina, F., Nurlindawati, & Dinariratri, A. S. (2023). Destana Patra: Desa tangguh bencana berbasis masyarakat pesisir di Desa Sungai Kupah, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6 (3), 306–318.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.51562>